

**DINAMIKA MENUJU KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
SAMARINDA “SEBUAH HARAPAN DAN TANTANGAN”**

Hari Siswanto*, Zainul Arifin dan Ariyanto

Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda-Kaltim

* E-mail: hariforestry@gmail.com

ABSTRACT

Mulawarman University with its principal scientific pattern: humid tropical forest and its environment, has natural laboratory in the form of Education Forest of Mulawarman University of Forestry Faculty (EFMF). That forest is interesting because EFMF is a representation of natural tropical forest which is in relatively good condition and also their position is very strategic. EFMF with its dynamic, both in biogeophysical condition and also natural disaster such as forest fire in 1982/1983, 1992/1993 and 1997/1998 also for the human activities interference. According to the interpretation of Landsat image of the year 2016, its landcover was dominated by secondary forest of an area of 204.13 ha (68.99%) and shrub of 67.97 ha (22.97%). Forest inventory conducted in 2016 showed 73 species of the trees. Wood volume in the shrub is 127,81 m³/ha with 130 trees/ha, while in the secondary forest is 135.46 m³/ha with 111 trees/ha. Estimation of carbon stock in EFMF was 32,937.79 ton. The existence of wild animal can be found such as Orangutan (*Pongo pygmaeus*), Owa-owa (*Hylobates muelleri*), the aves such as big eagle (*Thearaetus pennatus*) and Bondol eagle. The others were Phytons and Turtles. Others than biogeophysical condition and social culture of people around EFMF, the status of forest determination was also has changed with the changed of time, starting from the forest concession of CV Kayu Mahakam, then Collection forest of Mulawarman University, education forest of Mulawarman University Forestry faculty, Botanical garden of Unmul, forest parc of Samarinda, Forest Parc of Unmul Samarinda, finally based on decree of 674/Menhut-II/2011 that this forest was determined as Production Forest Management United of Samarinda (PFMU Samarinda) which will be proposed as Forest Education of Mulawarman University Forestry Faculty with the creation of long term documents of Forest management planning united (RPHJP) in the year of 2017. As EFMF has been promoted as PFMU, the potency of biogeophysical and social culture of the people surrounding the forest will be the big potential hope, although there are still so many constraints have to be faces, such as organization structure (synchronization between Forestry Faculty, educational forest management, and provincial forest service to Samarinda Forest Management United), coal mining activities to directly adjacent, vulnerability to forest fire, limited investment and the condition of infrastructure that has been broken down. Possibility and development of EFMF have been proposed as PFMU Center in East Kalimantan and Kalimantan as a whole, by constructing forest management models and the development of modern ecotourism.

Keywords: Forest dynamic; production forest management united (PFMU); educational forest of mulawarman university forestry faculty (EFMF)

ABSTRAK

Universitas Mulawarman dengan pola ilmiah pokoknya hutan tropis lembab dan lingkungannya, memiliki salah satu laboratorium alam berupa Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul (HPFU). Areal ini menjadi menarik karena HPFU merupakan representasi hutan alam tropis yang relatif cukup bagus dan posisinya yang sangat strategis. HPFU mengalami dinamika baik kondisi biogeofisik karena faktor alam khususnya kebakaran hutan tahun 1982/1983, 1992/1993, dan 1997/1998, maupun akibat aktivitas manusia. Hasil penafsiran citra Landsat liputan 2016 seluas 299,03 Ha, penutupan lahannya didominasi hutan sekunder seluas 204,13 ha (68,99%) dan belukar 67,97 ha (22,97%). Hasil inventarisasi hutan tahun 2016 dijumpai sebanyak 73 jenis pohon. Potensi rata-rata strata belukar 127,81 m³/ha dengan 130 batang/ha dan hutan sekunder 135,46 m³/ha dengan 111 batang/ha. Pendugaan cadangan karbon pada areal HPFU sebesar 32.937,79 ton. Sementara itu keberadaan satwa diantaranya Orang Utan (*Pongo pygmaeus*), Owa-owa (*Hylobates muelleri*), berbagai jenis burung seperti Rajawali (*Thearaetus pennatus*), Elang bondol, Ular Phyton, Kura-kura, dan lain-lain. Selain dinamika biogeofisik dan sosial budaya masyarakat sekitar HPFU, status penetapan kawasan hutan juga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu mulai dari bekas areal HPH CV Kayu Mahakam, berturut-turut menjadi Hutan Koleksi Universitas Mulawarman, Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul, Kebun Raya Unmul, Kebun Raya Unmul Samarinda, dan kini berdasarkan SK Menhut No.674/Menhut-II/2011 menjadi KPHP Samarinda yang penamaannya akan diusulkan menjadi KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (HPFU) bersamaan dengan pembuatan dokumen tata hutan dan RPHJP pada tahun 2017 ini. Penetapan HPFU sebagai KPHP menyebabkan potensi biogeofisik dan sosial budaya masyarakat sekitar hutan akan menjadi potensi harapan yang besar meskipun di sisi lain ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu : struktur kelembagaan yang ada (perlu adanya sinkronisasi antara Fakultas Unmul, Badan Pengelola Hutan Pendidikan Fakultas Unmul, dan Dishut Propinsi Kaltim tentang KPHP Samarinda, seperti aktivitas tambang batubara yang berbatasan langsung dengan kawasan KPHP Samarinda; kerawanan terhadap kebakaran hutan; keterbatasan investasi dan kondisi sarana dan prasarana yang sudah mulai rusak. Adapun peluang dan pengembangan KPHP Samarinda adalah diupayakan

sebagai KPH Center khususnya di Kaltim dan Kalimantan umumnya, pembangunan model-model pengelolaan hutan serta pembangunan ekowisata modern.

Kata kunci: Dinamika hutan; KPHP Samarinda; HPFU

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur merupakan salah satu dari wilayah Indonesia yang memiliki hutan tropis lembab dengan luasan 8.563.508 ha atau 61% dari total luas daratan yang ada berdasarkan data Statistik Kalimantan Timur tahun 2016. Keberadaan hutan di Kalimantan Timur memegang peranan penting dari dulu hingga sekarang, tidak saja pada hutan produksinya tetapi juga pada hutan lindung maupun hutan konservasi. Apalagi dengan adanya inisiasi dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darusalam, maka keberadaan hutan tropis lembab yang ada menjadikannya sebagai *Heart of Borneo* (HoB).

Universitas Mulawarman sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kalimantan Timur, sejak pendiriannya berusaha untuk menempatkan diri pada posisi dimana hutan sebagai lingkungan yang mewarnainya, sehingga pola ilmiah pokoknya adalah hutan tropis lembab dan lingkungannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka Fakultas Kehutanan sebagai salah satu Fakultas yang ada di Universitas Mulawarman menjadi ujung tombak dalam memberikan warna pengelolaan hutan di Kalimantan Timur khususnya, dan hutan tropis lembab pada umumnya. Salah satu laboratorium alam yang dimiliki adalah Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (KRUS sebutan lainnya). Keberadaannya yang strategis di kota Samarinda sebagai keterwakilan hutan tropis lembab, menarik perhatian tidak saja lembaga dalam negeri tapi juga luar negeri untuk bekerjasama khususnya dengan tujuan pendidikan dan penelitian. Dalam perjalanannya terjadi beberapa kali pergantian status kelembagaan dan penamaannya, dimana hal ini berkait erat dengan dinamika hutan serta kebijakan kehutanan yang berkembang.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan menjaga keseimbangan aspek produksi, ekologi serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan, yang selanjutnya disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Elvida dan Alviya 2009).

Dengan dukungan paket peraturan yang cukup lengkap dan terus diperbaharui, KPH saat ini menjadi kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terus didukung untuk segera operasional di Indonesia. Tanpa mengurangi porsi swasta dan pihak ketiga lainnya yang telah diberikan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kawasan, keberadaan KPH diharapkan mengisi kekosongan pengelola hutan di tingkat tapak khususnya pada areal yang belum dibebani perijinan apapun sehingga diharapkan kedepan tidak ada lagi hutan yang berstatus “*open access*”. Dengan minimnya “*open access forest*” maka potensi kerusakan akibat kegiatan-kegiatan ilegal diharapkan akan semakin menurun bahkan fungsi dan manfaatnya dapat segera ditingkatkan.

Sebagai pengelola di tingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan kehutanan secara nasional. Amanat dan peran strategis tersebut telah menjadikan pembangunan KPH sebagai salah satu prioritas nasional yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, dengan Indikator Kinerja utama adalah adanya Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan Wilayah KPH di seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH atau 20% Wilayah KPH yang telah ditetapkan (Dephut 2010). Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Propinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Samarinda yang rencananya diusulkan perubahan penamaannya menjadi KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (HPFU) bersamaan dengan penyusunan Dokumen Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjangnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dinamika yang terjadi (biogeofisik dan sosial budaya masyarakat) serta status kelembagaan pada Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman hingga menjadi KPHP, serta peluang-peluang harapan yang lebih baik dan kendala yang dihadapi.

METODE

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPHP Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

B. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan secara langsung (survei terestris) dalam bentuk sampling yaitu sistematis sampling, juga secara tidak langsung (dengan teknik penginderaan jauh) untuk melakukan stratifikasi sebagai dasar pengukuran terestris, meliputi potensi, karakteristik, bentang alam dan informasi lainnya. Sedangkan data sosial budaya masyarakat dilakukan secara *purposive sampling* (sampling bertujuan) pada beberapa desa di sekitar KPHP Samarinda.

C. Analisis Data

Dinamika tutupan lahan berdasarkan citra penginderaan jauh dianalisis secara digital. Selanjutnya data inventarisasi dan data sekunder lainnya dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk menggambarkan keterkaitan data satu dengan lainnya juga dilakukan analisis dengan sistem informasi geografi sesuai dengan petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan RPHJP KPHP (Anonim, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengelolaan

Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman merupakan bekas areal HPH CV Kayu Mahakam yang telah dieksploitasi secara tebang pilih, sehingga masih ada pohon-pohon besar yang tertinggal yang dapat dijumpai saat ini. Di samping vegetasi tingkat tinggi, berbagai jenis belukar juga masih banyak dijumpai selain vegetasi tingkat rendah dan lumut serta beberapa satwa liar, burung dan hewan air. Penandatanganan piagam bersama tanggal 9 Juli 1974 antara Rektor Unmul dan HPH CV Kayu Mahakam, disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Dr. Syarib Thayeb) dan Gubernur Kalimantan Timur A. Wahab Sjahranie. Namun setelah dilakukan pemancangan batas ternyata dari luas 300 ha tersebut, ada kurang lebih 50 ha termasuk lahan peruntukan transmigrasi. Setelah diselesaikan secara kekeluargaan warga transmigrasi menghibahkan areal tersebut kepada Universitas Mulawarman. Keberadaan Hutan Pendidikan berdampak pada minat lembaga-lembaga lokal dan luar negeri untuk bermitra seperti Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada tahun 1974-1976 Biotrop-LIPI dalam Program Man and Biosphere (MAB) di kawasan ini melakukan penelitian Hutan Tropika Humida. Pemerintah Jepang melalui JICA dan Pemerintah Jerman melalui GTZ mengajak Universitas Mulawarman memperluas kerjasama dan penelitian. Berdasarkan kerjasama tersebut Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman sebagai hutan koleksi meningkat menjadi Kebun Raya Universitas Mulawarman. Walikota Samarinda mengeluarkan surat penunjukan No. 25/Bangta.3/V/1997 tertanggal 26 Juni 1997 yang menyatakan bahwa areal Hutan Pendidikan Lempake seluas 300 ha sebagai Hutan Kota Samarinda.

Nota Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Universitas Mulawarman No.871/OT/2001-556.6/28/2001 tanggal 17 Februari 2001 ditandatangani Rektor Universitas Mulawarman Prof. Ir. Rachmad Hernadi, M.Sc. dan Wali Kota Samarinda Drs. H. Achmad Amins, MM, yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Kaltim. Dalam MoU tersebut pihak Pemerintah Kota Samarinda akan melengkapi fasilitas Rekreasi dan Universitas Mulawarman mengembangkan Kebun Raya menjadi pusat pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan Alam (Anonim 2008). Setelah beberapa periode (tahun 2014), Kebun Raya Unmul Samarinda disesuaikan kembali dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.406/Kpts-II/1999 dengan mengembalikan fungsinya yaitu sebagai Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan luas 299,03 ha. Dinamika Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman terus bergulir dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Propinsi Kalimantan Timur. Anonim (2013) menyatakan bahwa seluruh kawasan hutan di Indonesia terbagi habis dalam wilayah KPH. Satu dari beberapa KPH yang termuat dalam SK 674 tersebut adalah KPHP Samarinda (selanjutnya diusulkan menjadi KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman).

B. Potensi dan Kendala

1. Potensi yang dimiliki oleh KPHP Samarinda

Secara geografis KPHP Samarinda (HPFU) sebagai satu-satunya KPH yang ada di Kota Samarinda terletak antara 117°12'15.388"BT –

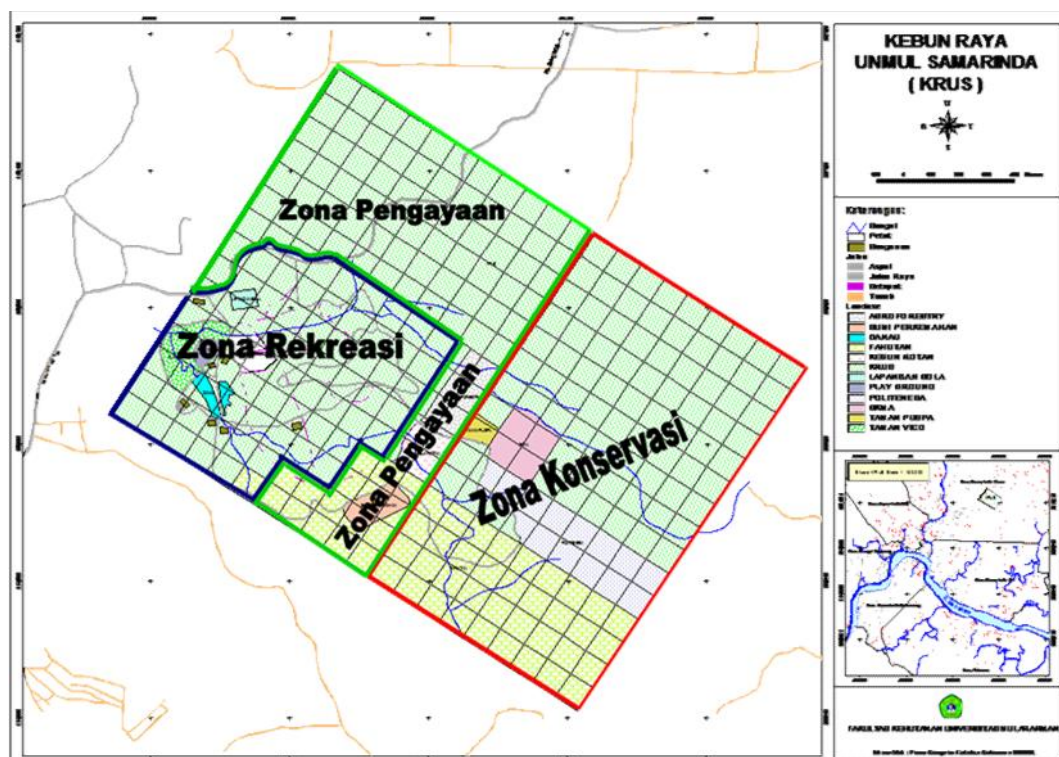
117°13'35.786" BT dan antara 0°26'17.435"LU – 0°27'32.769" LS. Secara hidrologis wilayah kelola KPHP Samarinda terletak pada bagian hulu SubDAS Karang Mumus yang mengalir ke Sungai Mahakam. Berdasarkan tata batas yang dilakukan oleh BPKH tahun 1997, KPHP Samarinda memiliki panjang 7.018,30 meter dan luas 299,03ha. Sementara itu menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 406/Kpts-II/99 tanggal 14 Juni 1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lempake sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman luasnya 299,03 ha.

KPHP Samarinda memiliki aksesibilitas yang baik karena dilalui oleh jalan poros yang

menghubungkan antara Kota Samarinda dan kota-kota lain di Kaltim yaitu Bontang, Sangatta dan Tanjung Selor. Saat ini jalan tersebut berstatus jalan nasional/negara karena menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Keadaan Topografi Kawasan KPHP Samarinda sebagian besar (67,8%) terdiri dari kawasan hutan dengan kelerengan landai sampai agak curam. Wilayah KPHP Samarinda sebagian besar merupakan Kawasan Hutan dengan tutupan vegetasi berupa hutan sekunder bekas tebangan (*logged-over areas*), dan belukar. Hasil interpretasi citra satelit dan pembagian Blok sebelum menjadi KPHP Samarinda (Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman) tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Penutupan lahan di kawasan Hutan Pendidikan Fahutan Unmul (HPFU).



Gambar 2. Zonasi Kebun Raya Unmul Samarinda.

Kegiatan Inventarisasi Hutan Pada KPHP Samarinda 2016 dilakukan pada 2 (dua) strata penutupan lahan yaitu belukar dan hutan sekunder. Dari hasil inventarisasi tersebut ditemukan 73 jenis seperti : Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), Meranti (*Shorea* spp), Keruing (*Dipterocarpus* spp), Gaharu (*Aquilaria*

malacensis), Jambu-jambu (*Eugenia* sp.), Durian (*Durio zibhetinus*), Cempedak (*Arthocarpus integra*), Kenanga (*Cananga odorata*), Kenari (*Canarium indica*), Puspa (*Schima walichii*), dan lain-lain. Potensi vegetasi pada strata hutan sekunder dan belukar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Potensi vegetasi pada strata hutan sekunder dan belukar di KPHP Samarinda Tahun 2016

Strata	Diameter									
	20-29 cm		30-39 cm		40-49 cm		50 cm		20 cm	
	V (m ³ /ha)	N (bt/ha)	V (m ³ /ha)	N (bt/ha)	V (m ³ /ha)	N (bt/ha)	V (m ³ /ha)	N (bt/ha)	V (m ³ /ha)	N (bt/ha)
Hutan Sekunder	14,81	42	23,30	34	12,46	13	84,89	23	135,46	111
Belukar	17,75	54	18,48	29	22,46	22	69,11	25	127,81	130

Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2015

Pada strata Belukar didapatkan bahwa Kelompok Pohon kelas diameter 20–29 cm mendominasi strata tegakan, adapun jenis yang mendominasi adalah Terap (*Artocarpus* spp). Pada strata Hutan Sekunder didapatkan bahwa Kelompok Pohon kelas diameter 20–29 cm mendominasi strata tegakan, dengan jenis yang mendominasi adalah Mahang (*Macaranga* spp).

Di wilayah KPHP Samarinda saat ini belum dilakukan inventarisasi potensi secara menyeluruh terhadap HHBK. Akan tetapi berdasarkan hasil survei biogeofisik dan sosial ekonomi di wilayah KPHP Hutan Pendidikan Fahutan Unmul

dijumpai: buah-buahan (durian, langsung, rambutan, lai, dan lain-lain), aren, gaharu, rotan, bambu, dan madu. Tonen (2000) menyatakan bahwa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di daerah tropis merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat yang tinggal di hutan maupun sekitar hutan. Di dalam beberapa kasus, bahkan berkontribusi terhadap pendapatan ekspor suatu negara seperti halnya dengan rotan di Indonesia atau kacang di Brazil dan Bolivia.

Sebagaimana dikemukakan bahwa jasa lingkungan hutan (*forest environmental services*) merupakan potensi sumberdaya hutan yang perlu

digali dan dimanfaatkan ke depan. Sumberdaya hutan sebagai gabungan produk proses biologis berupa berbagai jenis vegetasi dan kondisi tapak yang bervariasi, dalam kondisi tertentu-spesifik dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai “estetika-panorama” yang menarik. Keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversitas) juga merupakan potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan ke depan. Misalnya keberadaan hutan dalam wilayah kelola KPHP Samarinda juga merupakan potensi jasa lingkungan “keilmu-pengetahuan”. Wilayah KPHP Samarinda yang posisinya di Kota Samarinda serta dilalui oleh jalan nasional, apabila disinergikan dengan potensi “jasa lingkungan” yang lain dapat dikembangkan, seperti wisata alam (*eco-tourism*), wisata pendidikan dan penelitian (keilmu-pengetahuan) dan lain sebagainya.

Salah satu pertimbangan utama pengembangan KPHP Samarinda adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Oleh karenanya perhitungan jumlah karbon yang tersimpan (*carbon stock*) dan terserap (*carbon sink*) oleh keberadaan tegakan hutan dalam wilayah kelola KPHP Samarinda menjadi penting untuk mendapat perhatian dalam pengelolaannya ke depan. Mika (2016) menyatakan bahwa pendugaan cadangan karbon pada areal Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman adalah sebesar 32.937,79 ton.

Satwa yang ada di KPHP Samarinda berupa berbagai jenis serangga/insect, Orang Utan (*Pongo pigmaeus*), Owa-owa (*Hylobates muelleri*), Beruk (*Macaca nemestrina*), ular biru dan Ular Phyton. Hasil pengamatan tahun 2002 dijumpai 48 jenis burung diantaranya: Bangau Putih (*Egretta garzetta*), Bluwok (*Ibis cinevrus*), Ibis Hitam (*Black crane*), Merak (*Ravo muticus*), Tiung Emas (*Gracula religiosa*), Cucak Kutilang (*Pycnonotus plumosus*), Delimukan Jambrot (*Chalcophaps indica*), dan lain-lain. Rustam (2011) melaporkan bahwa di kawasan KPHP HPFU pada tahun 2007, 2008 dan 2009 ditemukan 36 jenis mamalia dari 15 famili dan 7 ordo.

Secara umum struktur perekonomian masyarakat didominasi oleh sektor di luar kehutanan yang lahannya milik sendiri dan berada di luar areal KPHP sehingga masyarakat yang menetap di sekitar KPHP tidak menggantungkan hidupnya dengan keberadaan hutan, kecuali masyarakat di Kelurahan Tanah Merah yang sebagian besar berjualan di dalam areal rekreasi pada KPHP HPFU. Menurut Widuri (2007),

mayoritas masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai, pedagang dan wiraswasta, selain itu masyarakat juga berkebun sayuran dan buah-buah serta berternak.

2. Kendala dan Permasalahan Pengelolaan KPHP Samarinda (Hutan Pendidikan Fahutan Universitas Mulawarman)

a. Status kelembagaan

Dengan berbagai fungsi kerjanya, keberadaan KPH bersifat unik. Selama ini organisasi daerah yang dibentuk berdasarkan PP No.41/2007 tidak mengenal adanya organisasi seperti KPH yang mempunyai sifat teritorial. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2010, wujud organisasi KPHP dan KPHL menemukan landasan hukum yang memayunginya. Secara garis besar, organisasi KPHP dan KPHL merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota. Namun sejak keluarnya UU No 23. Tahun 2014 kewenangan dialihkan sepenuhnya di tingkat Propinsi. Bila melihat kondisi di atas (sejarah pengelolaannya) maka kelembagaan KPHP Samarinda tentunya akan memiliki kendala untuk proses menuju kelembagaan yang operasional dengan dua induk yang dimilikinya. Upaya sedang dilakukan dengan mengkaji secara bersama antara Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Pengelola Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul (KRUS), dan Pemerintah Propinsi melalui Dinas Kehutanan, serta mengkonsultasikannya pada lembaga terkait pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Aktifitas tambang yang langsung berbatasan dengan kawasan KPHP Samarinda

Pertambangan batubara di Samarinda menimbulkan dampak terhadap dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, infrastruktur dan teknologi. Pertambangan batubara tersebut telah berkembang sejak beberapa dekade, dan semakin meluas ketika kebijakan otonomi daerah diterapkan pada awal tahun 2000-an. Seluruh tambang batubara di kota Samarinda dan sekitarnya dilakukan dengan operasi tambang terbuka yang memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan operasi tambang bawah tanah. Demikian halnya dengan operasi pertambangan batubara di sekitar kawasan khususnya yang berbatasan langsung dengan batas luar KPHP Samarinda sangat dirasakan dampak

yang ditimbulkannya, khususnya pada saat hujan terjadi akan berakibat pada aliran air yang bercampur lumpur ke dalam wilayah KPHP Samarinda sehingga tidak saja mengganggu infrastruktur yang ada bahkan berakibat pada menurunnya kualitas pertumbuhan tanaman hingga pada kematian vegetasi.

c. Kerawanan terhadap bahaya kebakaran hutan

Secara teoritis kebakaran hutan terjadi karena ada interaksi antara bahan bakar, oksigen, dan panas pada kondisi tertentu. Bila ketiga unsur tersebut ada secara bersamaan maka kebakaran akan terjadi. Oleh karena itu prinsip untuk menanggulangnya adalah dengan memutus salah satu unsur tersebut. Biasanya dengan menghilangkan bahan bakar panas (Anonim 2010). Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan lingkungan yang ada. Kejadian kebakaran hutan dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Tidak hanya faktor alam yang berpengaruh misalnya udara yang sangat panas di saat musim kemarau namun juga karena ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya hutan dan sikap yang ceroboh. Dengan posisi KPHP yang strategis dan akses yang mudah serta kondisi tanah yang mengandung batubara, tentunya pada saat-saat musim kemarau akan memiliki potensi untuk terjadinya kebakaran hutan. Apalagi dalam sejarahnya areal ini telah mengalami kebakaran hutan yaitu tahun 1982/1983, 1992/1993 dan 1997/1998. Kondisi yang demikian tentunya akan menjadikan bahanantisipasi untuk upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan.

d. Keterbatasan dalam investasi

Menilik dari sejarah pengelolaan sebelum terbitnya SK Menhut No.674/Menhut-II/2011 tentang penetapan KPHP dan KPHL di Kalimantan Timur yang salah satunya adalah KPHP Samarinda (yang nantinya diusulkan menjadi KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman), sebenarnya sudah terjadi investasi terkait pengelolaan areal yang ada di dalamnya, baik dari pemerintah, maupun swasta. Cukup besar perubahan khususnya secara fisik di lapangan berupa pembangunan sarana dan prasarana yang ada. Seiring berjalannya waktu, timbul kesulitan untuk pendanaan terkait pemeliharaan dan juga pengembangan wilayah kelola berkenaan dengan pro dan kontra terkait status yang ada berupa Kebun Raya yang penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu juga dengan

minimnya pendanaan dari Universitas Mulawarman dan tingkat kunjungan wisata yang semakin menurun, tentunya kondisi ini semakin sulit untuk keberlangsungan pengelolaan areal ini. Dengan penetapan sebagai KPHP Samarinda diharapkan akan memberikan keluwesan dan fleksibilitas dalam skema-skema pengelolaan termasuk skema investasinya.

e. Kondisi sarana dan prasarana yang sudah mulai rusak

Kendala dan permasalahan minimnya investasi karena beberapa hal yang melatarbelakanginya (seperti diutarakan sebelumnya), sangat berdampak sekali kepada menurunnya kualitas sarana dan prasarana yang ada. Hal ini tentunya secara langsung berpengaruh terhadap penurunan kunjungan dan imbas dari hal tersebut adalah penurunan pendapatan pengelola. Penurunan kunjungan ini juga dipengaruhi oleh semakin bertambahnya tujuan-tujuan wisata di kota Samarinda dan sekitarnya yang menawarkan bentuk-bentuk wisata yang lebih inovatif, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. Kendala dan permasalahan terkait hal ini, diharapkan dapat perlahan-lahan terpecahkan dengan status barunya sebagai KPHP Samarinda (KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman).

C. Peluang dan Pengembangan KPHP

1. Revitalisasi Kehutanan dan KPH Center

Analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di tahun 2010 terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia. Sesuai dengan rencana strategis Kemenhut 2010-2014 maka terdapat upaya prioritas untuk menyelamatkan hutan yang salah satunya adalah revitalisasi hutan dan produk kehutanan. Sistem pengelolaan yang dirasa tidak efektif mendorong terjadinya tingkat deforestasi yang tinggi mendorong lahirnya sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41/1999 Pasal 10, 12, dan 17 ayat (1) yang sekarang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep dasar dari KPH adalah menggeser peran birokrat kehutanan dari peran administratif menjadi peran manajerial sehingga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola hutan.

Penetapan KPHP Samarinda dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya diharapkan menjadi magnet tersendiri sebagai Pusat KPH khususnya di Kalimantan Timur dan hutan tropis lembab pada umumnya. Dengan latar belakang pengelolaan oleh akademisi dari Fakultas Kehutanan Unmul dan letaknya yang strategis sebagai keterwakilan hutan tropis lembab diharapkan mampu menjadi mitra bagi KPH khususnya KPH di Kaltim dan Kalimantan umumnya dalam berbagi data/informasi, serta model-model pengelolaan kawasan hutan sehingga akan membantu proses percepatan dalam pembangunan dan pengembangan KPH.

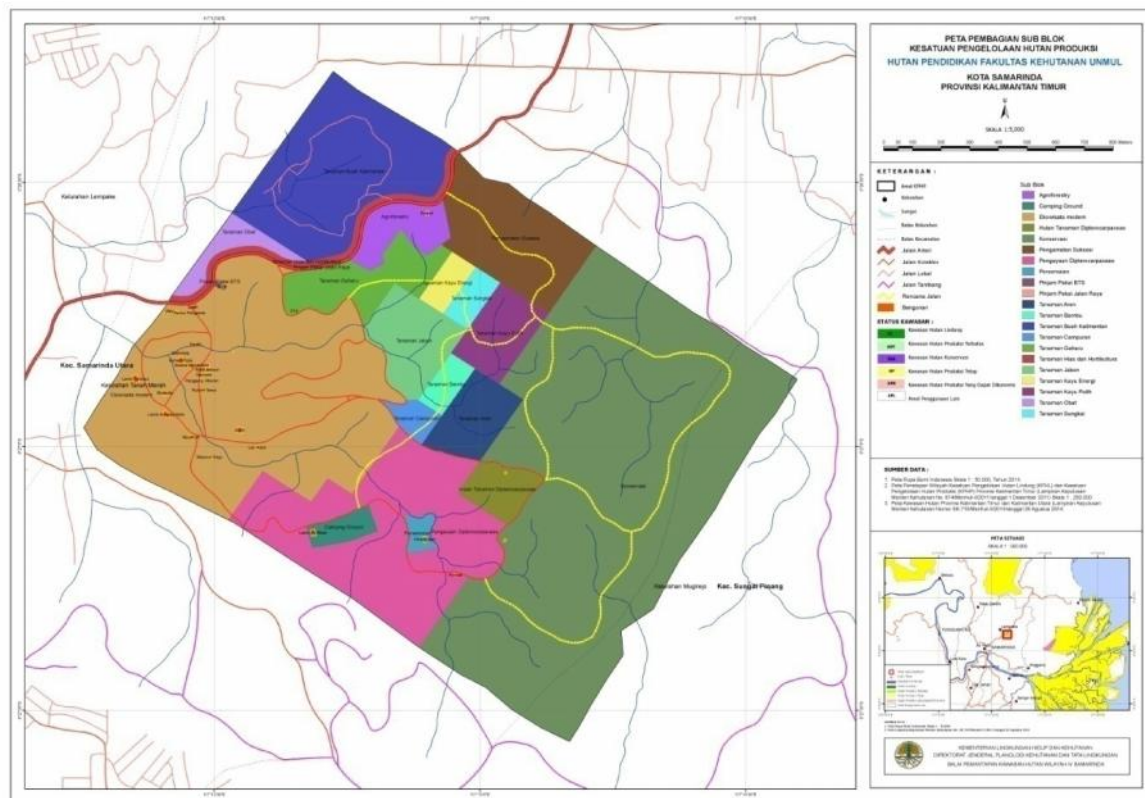
2. Pembangunan ramah lingkungan berdasarkan *Green Growth Compact*

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan wilayah bumi etam sebagai *Green Growth Compact* (GGC) guna mempercepat pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan. GGC merupakan sebuah komitmen yang dibentuk dengan melibatkan pemangku kepentingan, yakni pemerintah, swasta, masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan hijau guna menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup. Pembangunan hijau sudah dicanangkan sejak 2010 dalam gerakan Kaltim Hijau (*Green Kaltim*). Namun untuk memperkuat gerakan pembangunan hijau berkelanjutan tersebut, Kaltim kembali mendeklarasikan satu gerakan besar bertajuk GGC. Sejalan dengan program tersebut maka program KPH merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan GGC, dimana secara prinsip bagaimana KPH memaksimalkan dalam proses pembangunan hutan agar diperoleh manfaat tidak saja secara ekonomi tetapi juga keseimbangan alam tetap mengikutinya. Di tengah kuatnya tekanan lingkungan dari berbagai

kegiatan seperti pertambangan, perkebunan maupun kehutanan yang tidak terkendali, maka pembangunan KPHP Samarinda (Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman) diharapkan dapat memainkan peranannya dalam mendukung program GGC. Model-model pengelolaan hutan dalam skala kecil direncanakan akan dibangun sebagai proyek percontohan untuk diterapkan di masyarakat.

3. Pembangunan Ekowisata Modern

Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Secara umum objek kegiatan ekowisata tidak jauh berbeda dari kegiatan wisata alam biasa, namun memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap objek wisatanya. KPHP Samarinda memiliki potensi besar untuk kegiatan ekowisata berupa khasanah flora dan faunanya. Namun untuk meningkatkan daya tarik masyarakat pada berbagai lapisan tentunya dibutuhkan inovasi-inovasi dalam bentuk wisata buatan yang pada akhirnya memadukan antara unsur-unsur alam dengan unsur modern, yang tentunya bermuatan pendidikan. Hal ini menjadi menarik, mengingat ke depan daerah ini tidak seterusnya mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada dan semakin terbatas. Diharapkan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di bumi etam dengan membangun tempat-tempat tujuan wisata. Dengan potensi dan peluang pengembangan yang ada diharapkan KPHP Samarinda akan menjadi salah satu tujuan ekowisata modern. Peta berikut menyajikan rencana Pembagian Blok KPHP Samarinda (Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman).



Gambar 3. Peta rencana zonasi KPHP Samarinda.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. KPHP Samarinda (HPFU) sebagai representasi hutan tropis lembab di Samarinda berada pada posisi yang strategis dan memiliki potensi flora dan fauna yang dinamis, baik pengaruh karena kebakaran hutan yang pernah terjadi (1982/1983, 1992/1993, 1997/1998) juga akibat aktivitas pertambangan yang berbatasan langsung dengan areal KPHP Samarinda (HPFU).
2. Terjadi beberapa kali perubahan status dari Hutan Koleksi Unmul menjadi Kebun Raya Unmul, Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul, Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) dan sekarang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Samarinda (diusulkan menjadi KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul).
3. Hasil penafsiran citra Landsat liputan 2016, KPHP HPFU luasnya 299,03 ha, kondisi penutupan lahannya didominasi oleh hutan sekunder seluas 204,13 ha (68,99%) dan belukar 67,97 ha (22,97%). Hasil inventarisasi hutan tahun 2016 dijumpai sebanyak 73 jenis pohon. Potensi rata-rata pada strata belukar 127,81 m³/ha dengan 130 batang/ha dan pada hutan sekunder 135,46 m³/ha dengan 111

batang/ha. Pendugaan cadangan karbon sebesar 32.937,79 ton. Sementara itu keberadaan satwa masih cukup banyak diantaranya Orang Utan (*Pongo pigmaeus*), Owa-owa (*Hylobates muelleri*), berbagai jenis burung seperti Rajawali (*Theoraetus pennatus*), Elang bondol, Ular Phyton, Kura-kura, dan lain-lain. Hasil hutan bukan kayu berupa tanaman buah-buahan (durian, langsung, rambutan, lai, dan lain-lain), gaharu, aren, rotan, bambu, dan madu.

4. Kendala dan permasalahan yang dihadapi berupa: Struktur kelembagaan yang ada (perlu adanya sinkronisasi antara Fahutan Unmul, Pengelola KRUS, dan Dishut Provinsi Kalimantan Timur tentang KPHP Samarinda); Aktivitas tambang yang langsung berbatasan dengan KPHP Samarinda; Kerawanan terhadap kebakaran hutan; keterbatasan dalam investasi dan Kondisi sarana dan prasarana yang sudah mulai rusak.
5. Peluang dan pengembangan KPHP Samarinda: Sebagai KPH Center (khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan umumnya); Pembangunan contoh model-model pengelolaan hutan serta pembangunan ekowisata modern.

B. Saran

Terkait kelembagaan yang ada dan menyongsong status KPHP Samarinda (diusulkan KPHP HPFU) yang sudah ditetapkan serta penerapan UU No. 23 Tahun 2014, perlu didorong percepatan koordinasi antara pihak terkait guna operasionalisasi kelembagaan yang baru.

Management. Holz als Roh-und Werkstoff 58. 196-201.

Widuri, W.E. 2007. Persepsi Masyarakat Tentang Kawasan Konservasi di Kebun Raya Unmul Samarinda. Skripsi Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda (KRUS). Kerjasama Pemerintah Kota Samarinda dengan Universitas Mulawarman.
- Anonim. 2010. Program Menuju Indonesia Hijau. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2012. Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor:P.5/VII-WP3H/2012. Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Anonim. 2013. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. Jakarta.
- Elvida, Y.S. dan Alviya, I. 2009. Kendala dan Strategi Implementasi Pembangunan KPH Rinjani Barat. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 6(1):1-14
- Departemen Kehutanan (Dephut) 2010. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2010-2029. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Mika, M. 2016. Pendugaan Cadangan Karbon pada Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul. Skripsi Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- Rustam. 2011. Daftar Mamalia di Kebun Raya Unmul Samarinda. Ecositrop 1(2):
- Tonen, R. 2000. The Role Non Timber Forest Product in Sustainable Tropical Forest